



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan OPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2025 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025, yang merupakan bentuk laporan akuntabilitas yang mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada public dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa yang akan datang serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja selanjutnya yang jauh lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penyusunan Laporan ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Bandar Lampung, Januari 2026
Plt.Kepala Dinas PP dan KB



Henny Maryuniwati.,S.STP,MM
NIP. 19830605 200112 2002

Daftar Isi

	<u>hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Gambaran Umum	6
1.4.1. Dasar Hukum Organisasi	6
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4.3 Struktur Organisasi	7
1.4.4 Isu Strategis yang sedang dihadapi	7
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja	9
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian antara target dan realisasi kinerja Program Di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	26
3.1 Capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	30
3.2 Perbandingan Capaian Realisasi kinerja tahun 2024 Dan Tahun 2025	30
3.3 Analisis program / kegiatan pencapaian kinerja	33
B. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	38
C. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Program Dan Kegiatan	42
BAB IV	52
PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditentukan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. SK Kepala LAN Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. PERMENPAN No : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Penilaian Pencapaian Kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

1.4.1 Dasar Hukum Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2016. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas

Pemerintah Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di Kota Bandar Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Jabatan Fungsional Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- d. Bidang Keluarga Berencana;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
- f. Bidang Pengendalian Penduduk ;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

1.4.4 Isu Strategis Yang Sedang Dihadapi

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, masalah atau hambatan yang ditemui antara lain :

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Bangga Kencana , yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
- Dukungan penyediaan alat kontrasepsi yang belum memadai
- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Masyarakat masih Tabu tentang edukasi alat kontrasepsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Visi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung mengikuti Visi Walikota Bandar Lampung yaitu : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

2. Misi

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ada dalam Misi ke-Satu Walikota dan Wakil Walikota yaitu: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ada dalam tujuan Walikota dan Wakil Walikota yaitu Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Anggaran Tahun (2025)				Catatan Penting	Perubahan Tahun (2025)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		B. Lampung	100%	5.271.116.739	APBD		100%	5.168.418.589
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	OPD PP DAN KB	B. Lampung	100%		APBD		100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	OPD PP DAN KB	B. Lampung	4 laporan	16.304.967	APBD		4 laporan	16.304.967

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Anggaran Tahun (2025)				Catatan Penting	Perubahan Tahun (2025)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	OPD PP DAN KB	B. Lampung	100%		APBD		100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OPD PP DAN KB	B. Lampung	29 orang	3.952634.344	APBD		29 orang	3.952634.344
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Laporan	147.196.520	APBD		1 Laporan	141.556.520
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Laporan	7.209.331	APBD		1 Laporan	7.209.331
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	OPD PP DAN KB	B. Lampung	100%		APBD		100%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

					Aparatur								
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	29 orang	15.000.000	APBD	29 orang	15.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	OPD PP DAN KB	B. Lampung	100%				100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	5.058.807	APBD		1	5.058.807
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	54.158.472	APBD		1	46.795.322
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	4.996.629	APBD		1	4.996.629
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	110.000.000	APBD		1	10.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	4.000.000	APBD		1	4.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	59.121.477	APBD		1	59.121.477

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	OPD PP DAN KB	B. Lampung	100%		APBD		100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	158.000.000	APBD		1	158.000.000
				Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1	504.000.000	APBD		1	504.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	OPD PP DAN KB	B. Lampung	98%		APBD		98%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Unit	45.430.000	APBD		1 Unit	45.430.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	OPD PP DAN KB	B. Lampung	3 Unit	149.680.000	APBD		3 Unit	159.985.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	OPD PP DAN KB	B. Lampung	5 Unit	14.580.000	APBD		5 Unit	14.580.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

					Total Fertility Rate (TFR)	OPD PP DAN KB	B. Lampung	2.15%	89.423.599	APBD		2.15%	89.423.599
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	OPD PP DAN KB	B. Lampung	19				19	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	OPD PP DAN KB	B. Lampung	3	89.423.599	APBD		3	89.423.599
				Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Dokumen	29.872.832	APBD		1 Dokumen	29.872.832
				Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Dokumen	29.636.042	APBD		1 Dokumen	29.636.042
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	OPD PP DAN KB	B. Lampung	1 Dokumen	29.914.725	APBN		1 Dokumen	29.914.725

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Masyarakat Kota B.lampung	B. Lampung	1	104.684.795	APBD		1	104.684.795
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	OPD PP DAN KB	B. Lampung	12	37.106.088	APBD		12	37.106.088
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kecamatan	B. Lampung	2 Kegiatan	7.508.553.855	APBD		2 Kegiatan	8.735.053.855
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Jumlah Sarana Pendukung	Kecamatan	B. Lampung	2	71000000	APBD		2	210.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				PKB/PLKB	Operasional PKB/PLKB yang Tersedia								
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	B. Lampung	2.900	7.437.553.855	APBD		2.900	8.525.053.855

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Faskes	B. Lampung	3 Kegiatan	1.107.829.912	APBD		3 Kegiatan	1.058.524.912
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kecamatan	B. Lampung	1	135.811.672	APBD		1	86.506.672
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	B. Lampung	12	888.498.240	APBN		12	888.498.240
				Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Faskes	B. Lampung	12	83.520.000	APBD		12	83.520.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	OPD PP DAN KB	B. Lampung	Kegiatan	1.120.890.800	APBD		Kegiatan	1.120.890.800
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	B. Lampung	1 Organisasi	571.445.400	APBN		1 Organisasi	571.445.400

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	B. Lampung	1 Kampung	549.445.400	APBN		1Kampung	549.445.400
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-------------	------	--	----------	-------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Kelompok	B. Lampung	94%	7.311.478.556			94%	9.100.138.950
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat	B. Lampung	2 Kegiatan				2Kegiatan	
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),BinaKeluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	B. Lampung	134 kelompok	4.559.188.219	APBD		134 kelompok	5.140.688.219
				Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan	Poktan	B. Lampung	1 Laporan	20.691.945	APBD		1 Laporan	20.691.945

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PI K R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Poktan	B. Lampung	716 kelompok	2.656.354.202	APBD	716 kelompok	3.731.364.202
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat	B. Lampung	Kegiatan			Kegiatan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung

				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Masyarakat	B. Lampung	1 Laporan	18.134.471	APBN	1 Laporan	18.134.471
				Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Poktan	B. Lampung	1 Organisasi	57.109.719	APBD	1 Organisasi	189.260.113
JUMLAH							22.551.084.344			25.414.241.588		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. Capaian Kinerja Program Di Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan pengukuran kinerja organisasi yang digunakan oleh Dinas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pencapaian kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025 didasarkan pada pengukuran indikator kinerja sasaran dengan pendekatan capaian outcome, output dan capaian kategori yang diperoleh. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025. Kriteria penilaian dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

3.1 Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

Sasaran Kinerja	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Sasaran (%)	Realisasi 2025(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) .	2.15	2.12
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19)	19	12.9
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	73.50	66.69
		Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	8.70	6.67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	89	94

Penjelasan :

1) Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) .	%	$TFR = 5 \times ASFR_i$ (Jumlah Kelahiran per kelompok umur)/ 1.000	$5 \times (420)/1000$	2.12%

Target Indikator kinerja untuk persentase Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) ., memiliki capaian sebesar 2.12 % Target Tahun 2025 sebesar 2.15%. Masih tingginya angka kelahiran di Kota Bandar Lampung dimana satu keluarga masih memiliki anak diatas 2 anak.

2) Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19)	%	$\frac{\text{Jumlah wanita usia 15-19 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran wanita usia 15-19 tahun}} \times 1000$	$\frac{2.500}{195} \times 1000$	12.9

Target Indikator kinerja Cakupan ASFR 15-19 tahun memiliki capaian sebesar 12.9%. Target Tahun 2025 sebesar 19% . Sudah dibawah target berarti pada kelompok usia 15-19 tahun, terdapat 12,9 kelahiran per 1.000 wanita.

3) Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	%	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	$\frac{83.250}{125.102} \times 100\%$	66.69%

Target Indikator kinerja Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive(mCPR) memiliki capaian sebesar 66.69 % Target Tahun 2025 sebesar 73.50%. Masih dibawah target Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive(mCPR) untuk kota bandar lampung dikarenakan masih banyaknya Pasangan Usia subur yang tidak mau menggunakan metode kotrasepsi modern seperti Implan,IUD,Vasektomi,dan Tubektomi.

4) Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	%	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	$\frac{8.347}{125.102} \times 100\%$	6.67%

Target Indikator kinerja Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmeet need) memiliki capaian sebesar 6.67% Target Tahun 2025 sebesar 8.70% . Capaian sudah dibawah target untuk Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmeet need).

5) Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Anggota Bkb Hadir Pertemuan}}{\text{Jumlah Keluarga Anggota BKB}} \times 100$	$\frac{4621}{4893} \times 100\%$	94%

Target Indikator kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB memiliki capaian sebesar 94 % Target Tahun 2025 sebesar 89 % . Sudah Tercapai target untuk Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB untuk kota bandar lampung dikarenakan sudah banyaknya Peserta KB Aktif yang mengikuti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).

3.2 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun Restra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Target Akhir Tahun Restra 2029
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	- Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) - Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	2.19 0	2.12 12.9	2.13 15
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	- Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)	72.24	66.69	77.50
		- Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	7.52	6.67	8.50
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	94	94	95	

Penjelasan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024, Tahun 2025 dan Target Akhir Tahun 2029 Restra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1) Hasil Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Indikator kinerja untuk persentase Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Pada tahun 2024 sebesar 2.19 % dan pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 2.12 % dan untuk Target akhir dari Restra sebesar 2.13%. Untuk pencapaian di setiap tahun pada persentase Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) khususnya di Kota Bandar

Lampung, Sudah mengalami penurunan tapi untuk angka kelahiran di Kota Bandar Lampung dimana satu keluarga masih memiliki anak diatas 2 anak. Dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah menjalankan program Inovasi berupa “ Sapa Petis “ (Sarana Mobil Unit Pelayanan KB Gratis) yang pelaksanaan dilakukan setiap bulan melayani pelayanan KB bagi seluruh masyarakat Bandar Lampung secara Gratis.

2) Hasil Capaian Indikator Kinerja

Target Indikator kinerja Cakupan ASFR 15-19 tahun memiliki capaian sebesar 12.9 Target Tahun 2025 sebesar 19 dan untuk Target akhir dari Renstra sebesar 15. Untuk tahun 2025 Sudah dibawah target berarti pada kelompok usia 15-19 tahun, terdapat 12,9 kelahiran per 1.000 wanita.

3) Hasil Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Indikator kinerja Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive(mCPR) pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 72.24 % dan pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 66.69 % dan untuk Target akhir dari Renstra sebesar 77.50 %. Untuk pencapaian di pada tahun 2025 masih rendah untuk Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive(mCPR) dikarenakan masih banyaknya masyarakat tidak mau menggunakan metode kontrasepsi modern, seperti Implan,IUD,Vasektomi,dan Tubektomi. Untuk pengendaliannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Telah melakukan kegiatan berupa pelaksanaan pencarian Akseptor khususnya pada PUS (Pasangan Usia Subur) melalui kader PPKBD dan Sub PPKBD yang berjumlah 2.900 orang untuk dapat mencari para calon Akseptor se Kota Bandar Lampung.

4) Hasil Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Indikator kinerja Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 7.52 % dan pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 6.67 % dan untuk Target akhir dari Renstra sebesar 8.50%. Untuk pencapaian di setiap tahun di Kota Bandar Lampung sudah diatas target untuk Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) dikarenakan sudah menurunnya Pasangan Usia subur yang tidak ingin Ber-KB dengan berbagai alasan seperti : Alasan kesehatan,Takut efek samping,Tidak mengetahui tentang alat kontrasepsi,biaya mahal, dll. Untuk pengendaliannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Telah melakukan kegiatan berupa pencegahan melalui program pelayanan KB gratis diseluruh fasilitas pelayanan tingkat pertama (PUSKESMAS) dan Bidan pratek swasta yang sudah melakukan kerjasama (MOU) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5) Hasil Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Indikator kinerja Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 94 % dan pada tahun 2025 memiliki capaian sebesar 94 % dan untuk Target akhir dari Renstra sebesar 95 %. pada tahun 2025 sudah mencapai target Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga untuk kota bandar lampung dikarenakan sudah banyaknya Peserta KB Aktif yang mengikuti kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Untuk pengendaliannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Telah melakukan kegiatan berupa pelaksanaan Kelompok BKB yang ada diseluruh Kecamatan sejumlah 134 kelompok BKB.

3.3 Analisis program / kegiatan pencapaian kinerja

No	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.15%	2.12		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19) 19	12.9		
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ 3 Kegiatan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan 1 Dokumen	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen	100 % Terlaksananya kegiatan		

No	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) 8.70%	6.67%		
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 73.50 %	66.69%		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3 Kegiatan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2 Kegiatan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (Dak Fisik)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 1 unit	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2900 kader	100 % Terlaksananya kegiatan		

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 unit	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Kebutuhan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 organisasi	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 kampung	100 % Terlaksananya kegiatan		

No	Sasaran Kinerja	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 89%	94 %		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Kegiatan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 134 kelompok	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		

		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK) 1 laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 kegiatan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 laporan	100 % Terlaksananya kegiatan		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 organisasi	100 % Terlaksananya kegiatan		

B. Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		%
		Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.168.418.589	3.627.390.038	70.18
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.304.967	16.030.997	98
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.952.634.344	2.692.475.855	68
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	141.556.520	119.933.602	85
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	7.209.331	5.143.847	71
	kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			
	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15.000.000	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	5.058.807	4.927.664	97
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.795.322	42.089.441	90
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	25.000.000	9.800.000	39
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.742.821	3.805.400	100
	Sub Kegiatan Penyediaan barang	10.000.000	9.888.000	67

	Cetakan dan penggandaan			
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.000.000	3.795.000	99
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.121.477,00	5.320.000	9
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listik	158.000.000	108.033.244	68
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.000.000	504.000.000	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.430.000	3.272.557	7
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	159.985.000	85.025.431	53
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	13.849.000	95
	Program Pengendalian Penduduk	89.423.599	20.481.213	23
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pemetaan Kependudukan	29.636.042	8.599.319	29
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian dampak kependudukan	29.914.725	6.142.897	21
	Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi keluarga	29.872.832	5.738.997	19
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.056.260.450	5.312.183.913	65
	Kegiatan Pelaksanaan Avdokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk			
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	104.684.795	67.564.236	65

	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	37.106.088	24.479.885	66
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan (PKB/PLKB)			
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (Dak Fisik)	210.000.000	196.619.500	94
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.525.053.855	4.356.478.837	51
	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	86.506.672	15.407.355	18
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	888.498.240	250.510.900	28
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	83.520.000	18.980.000	23
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB			
	Sub kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (DAK NON FISIK)	571.445.400	273.543.200	48
	Sub kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK DI Kampung KB (DAK NON FISIK)	549.445.400	108.600.000	20
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	9.100.138.950	6.340.319.231	70
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina keluarga Balita (BKB), Bina	5.140.688.219	2.936.934.165	57

	Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.691.945	8.360.604	40
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK)	3.731.364.202	3.341.194.386	90
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga			
	Sub kegiatan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.134.471	13.860.000	76
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	189.260.113	39.970.076	21
	Jumlah	25.414.241.588	15.300.374.395	60.20

C. CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. **Program penunjang urusan pemerintah daerah** dari anggaran sebesar Rp. 5.168.418.589 terealisasi sebesar Rp. 3.627.390.038 atau 70.18 % Capaian kinerja berupa :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi :

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 16.304.967 Terealisasi sebesar Rp. 16.030.997 atau 98% dengan target kinerja 4 Laporan dan realisasi kinerja (100%).

Realisasi kinerja outputnya adalah meliputi Tersedianya dokumen LAKIP,LPJ,Renja,Renstra.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meliputi :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 3.952.634.344 , terealisasi sebesar Rp. 2.692.475.855 atau 68%, dengan target kinerja Pembayaran gaji selama 12 bulan dan realisasi kinerja (100%).

Realisasi kinerja outputnya adalah dibayarkannya gaji dan tunjangan kinerja pegawai selama 12 bulan sejumlah 29 orang.

b) Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 141.556.520 , terealisasi sebesar Rp. 119.933.602 atau 85%.

Realisasi kinerja outputnya adalah dibayarkannya honorarium KPA, PPK ,pejabat penatausahaan keuangan,bendahara pengeluaran,PPTK dan pejabat pengadaan

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran Rp. 7.209.331 , terealisasi sebesar Rp. 5.143.847 atau 71%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi :

- a) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 0

Realisasi kinerja outputnya adalah Tidak adanya Pendidikan dan pelatihan pegawai yang terlaksana.

- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah meliputi :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp.5.058.807 terealisasi sebesar Rp. 4.927.664 atau 97%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya alat komponen listrik/penerangan bangunan kantor

- b) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 46.795.322 Terealisasi sebesar Rp. 42.089.441 Atau 90 %.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya alat tulis kantor.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 3.742.821 Terealisasi sebesar Rp. 3.805.400 atau 100%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya peralatan rumah tangga kantor.

- d) Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 25.000.000 Terealisasi sebesar Rp. 9.800.000 atau 39 %.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor .

- e) Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 10.000.000, terealisasi sebesar Rp. 9.888.000 atau 67%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya cetakan rutin kantor

- f) Sub Kegiatan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 4.000.000, terealisasi sebesar Rp. 3.795.000 atau 99%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya bacaan koran kantor

- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 59.121.477, terealisasi sebesar Rp. 5.320.000 atau 9%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.

- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Meliputi :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 158.000.000 terealisasi sebesar Rp. 108.033.244 atau 68% .

Realisasi kinerja outputnya adalah Terbayarkannya Listrik, Internet, Telpon Kantor selama 12 bulan.

- b) Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp. 504.000.000 terealisasi sebesar Rp. 504.000.000. atau 100%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Terbayarkannya Honorarium tenaga kontrak selama 12 bulan.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meliputi :

a) Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran Rp. 45.430.000, terealisasi sebesar Rp. 3.272.557 atau 7%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya pembayaran pajak untuk kendaraan dinas jabatan

b) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 159.985.000 terealisasi sebesar Rp. 85.025.431 atau 53%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya BBM ,pemeliharaan (servis) dan pembayaran pajak untuk kendaraan dinas lapangan sejumlah 4 unit (mobil Akseptor, Mupen, Muyan, Alkon).

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 14.580.000, terealisasi sebesar Rp. 13.849.000 atau 95%.

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya servis untuk computer, printer dan ac kantor.

2. **Program Pengendalian Penduduk** dari anggaran sebesar Rp. 89.423.599 terealisasi sebesar Rp. 20.481.213 atau 23 %.

Capaian kinerja berupa :

- Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota

d) Sub Kegiatan Pemetaan kependudukan didukung anggaran sebesar Rp. 29.636.042 dengan realisasi sebesar Rp. 8.599.319 atau 29 % dengan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi kinerja (100%).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya seluruh kegiatan adanya profil dokumen pemetaan kependudukan.

- e) Sub Kegiatan Kajian dampak kependudukan didukung anggaran sebesar Rp. 29.914.725 dengan realisasi sebesar Rp. 6.142.897 atau 21 % dengan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi kinerja (100%).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya seluruh kegiatan Kajian dampak kependudukan, adanya profil dokumen kajian dampak kependudukan.

- f) Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi keluarga didukung anggaran sebesar Rp. 29.872.832 dengan realisasi sebesar Rp. 5.738.997 atau 19 % mencapai dengan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi kinerja (100%).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya Kegiatan penyediaan data dan informasi keluarga, adanya profil dokumen untuk data dan informasi keluarga, untuk laporan bulanan di SIGA disetiap bulannya dilaporkan

- 2) **Program Keluarga Berencana** dari anggaran sebesar Rp. **11.056.260.450** terealisasi sebesar Rp. **5.312.183.913** atau 65 %. Capaian kinerja berupa :

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunkais, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Lokal

- a) Sub Kegiatan Komunikasi , Informasi, dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal didukung sebesar Rp. 104.684.795 dan terealisasi sebesar Rp. 67.564.236 atau 65 % dengan target kinerja 1 Dokumen dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya kegiatan Bandar Lampung Expo , dan Lampung Expo.

b) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBP (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga didukung anggaran sebesar Rp. 37.106.088 dan terealisasi sebesar Rp. 24.479.885 atau 66 % dengan target kinerja 12 Laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya Pelayanan KB setiap bulan bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung secara statis dilakukan di fasilitas Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan(PKB/PLKB) :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Saranan Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK FISIK) didukung anggaran sebesar Rp. 210.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 196.619.500 , atau 94% dengan target kinerja 1 Unit dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Tersedianya Belanja pemeliharaan Gedung bangunan kantor balai penyuluh KB Di Kecamatan Labuhan Ratu,Sukarame,Kemiling,Kedaton.

b) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) didukung anggaran sebesar Rp. 8.525.053.855. dan terealisasi sebesar Rp. 4.356.478.837 atau 51% dengan target kinerja 2.900 orang kader dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah sudah dilakukannya pembinaan kepada kader PPKBD dan SUB PPKBD dan sudah terbayarnya honor kader PPKBD yang berjumlah 126 kader dan Kader SUB PPKBD yang berjumlah 2.774 kader yang ada di Kota Bandar Lampung Selama 4 (empat) bulan.

- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB didukung anggaran sebesar Rp. 86.506.672 dan terealisasi sebesar Rp. 15.407.355 atau 18 % dengan target kinerja 1 Unit dan realisasi kinerja mencapai (100 %).
Realisasi kinerja outputnya adalah Terlayannya pelayanan KB seluruh masyarakat kota bandar lampung.
 - b) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Bergerak didukung anggaran sebesar Rp. 888.498.240 dan terealisasi sebesar Rp. 250.510.900, atau 28 % dengan target kinerja 12 Laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).
Realisasi kinerja outputnya adalah Terlayannya pelayanan KB setiap bulan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, BPS) di Kota Bandar Lampung
 - c) Sub Kegiatan Dukungan operasional KB Bergerak didukung anggaran sebesar Rp. 83.520.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.980.000, atau 23% dengan target kinerja 12 Laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).
Realisasi kinerja outputnya adalah Terlayannya pelayanan KB seluruh masyarakat kota bandar lampung.
- Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb :

- a) Sub kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB didukung anggaran sebesar Rp. 571.445.400 dan terealisasi sebesar Rp. 273.543.200 atau 48% dengan target kinerja 1 organisasi dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Kinerja sudah terlaksana seluruhnya dalam pelaksanaan untuk operasional rutin di Balai penyuluh KB dan pembinaan dibalai penyuluh KB.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas didukung anggaran sebesar Rp. 549.445.400 dan terealisasi sebesar Rp. 108.600.000 atau 20% dengan target kinerja 1 Kampung KB dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Kinerja sudah terlaksana seluruhnya dalam pelaksanaan untuk Pembinaan pokja kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dari anggaran sebesar Rp. 9.100.138.950 terealisasi sebesar Rp. 6.340.319.231 atau 70 %. Capaian kinerja berupa :

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

- a) Sub Kegiatan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) didukung anggaran sebesar Rp. 20.691.945 dan terealisasi sebesar Rp. 8.360.604, atau

40% dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya 1 Kali Pembinaan Poktan BKB, dan BKL.

- b) Sub Kegiatan Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) didukung anggaran sebesar Rp. 5.140.688.219 dan terealisasi sebesar Rp. 2.936.934.165 atau 57% dengan target kinerja 134 kelompok BKB dan realisasi kinerja mencapai (65 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya Pembinaan di 134 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Se-kota Bandar Lampung. Dan sudah terbayarnya honor kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang berjumlah 1825 kader yang ada di Kota Bandar Lampung Selama 4(empat) bulan.

- c) Sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK) didukung anggaran sebesar Rp. 3.731.364.202 dan terealisasi sebesar Rp3.341.194.386, atau 90 % dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya Pembinaan di 716 Kelompok Tim Pendamping keluarga Se-kota Bandar Lampung. Dan sudah terbayarnya honor kader Tim Pendamping

keluarga (TPK) yang berjumlah 2.148 kader yang ada di Kota Bandar Lampung Selama 5 (lima) bulan.

- Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a) Sub Kegiatan Sub kegiatan Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) didukung anggaran sebesar Rp. 18.134.471 dan terealisasi sebesar Rp. 13.860.000, atau 76 % dengan target kinerja 1 Organisasi dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada ibu hamil dan menyusui, dan kader poktan.

b) Sub Kegiatan Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) didukung anggaran sebesar Rp. 189.260.113 dan terealisasi sebesar Rp. 39.970.076, atau 21 % dengan target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja mencapai (100 %).

Realisasi kinerja outputnya adalah Terlaksananya kegiatan pertemuan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Di Kota Bandar Lampung.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meningkat setiap tahunnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam peningkatan kinerja pada tahun 2025 berupa adanya inovasi dalam Percepatan penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung.

Dari jumlah sasaran sesuai dengan misi yang dijabarkan yang harus dicapai dalam tahun 2025 secara keseluruhan dapat dicapai 100 % namun demikian dari berbagai sasaran tersebut masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dimasa depan akan menghadapi tantangan yang semakin berat dengan lingkungan strategis yang berada yaitu akan terjadi pergeseran yang semula hanya menekankan pada pendekatan geografis atau kependudukan saja kemudian berkembang lebih mengarah pada kesehatan reproduksi. Didukung oleh kegiatan yang dibiayai anggaran daerah. Kondisi yang demikian akan memperkuat peluang dan harapan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di Kota bandar Lampung yang cukup memerlukan pemikiran dan keterpaduan dengan sektor-sektor terkait untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kota Bandar Lampung khususnya.